

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA SUMENEP

Herlina Mega Yuliyanti¹, Yaqub Cikusin², Hirshi Anadza³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: herlinamegayulianti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan Program BPNT yang ada di Kota Sumenep dan Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Program BPNT yang ada di Kota Sumenep. Selain itu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas berdasarkan fenomena-fenomena yang alamiah berdasarkan fakta. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pwnwliti menggunakan Kepercayaan, Validitas, keteguhan serta Konfirmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT yang ada di Kota Sumenep Cukup efektif karena dengan adanya Pandemi Covid-19 ini penyaluran program BPNT ini mengalami keterlambatan. Selain itu adapun kelebihan dari Program BPNT ini yaitu dapat menghemat waktu karena Program ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi. Selain itu adapun kelemahan dari program BPNT ini yaitu pembaruan data KPM yang telah meninggal cukup lama.

Kata Kunci: Efektivitas, Program BPNT, Pandemi, Covid-19

Pendahuluan

Seperti yang di ketahui Beras merupakan salah satu bahan pokok makanan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan pangan. Dengan harga beras yang tidak menentu terkadang membuat masyarakat tidak dapat memenuhi Kebutuhan pangannya. Dengan begitu maka pemerintah pada saat keadaan indonesia dalam keadaan krisis moneter mengeluarkan kebijakan program RASKIN yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemiskinan akan selalu ada di berbagai negara, salah satunya di Indonesia yang merupakan negara berkembang, dengan angka kemiskinan yang relatif cukup tinggi. Selain itu kemiskinan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

Dalam menanggulangi kemiskinan dan beban masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan program RASKIN. Dilansir dari Kemensos.pusdatin, Pada tahun 1998 pada saat Indonesia dalam keadaan krisis moneter pemerintah memulai kebijakan program raskin dengan mengeluarkan bantuan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin. Program RASKIN bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Terutama untuk rumah tangga miskin, dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengakses kebutuhan pokok beras.

Pada awalnya program RASKIN ini disebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2002 program RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan sebagai bagian dari perlindungan sosial. Dalam kebijakan program RASKIN diharapkan akan menjadi tepat sasaran serta mencapai tujuan dari kebijakan program RASKIN. Pada kenyataannya kebijakan program RASKIN menuai berbagai permasalahan sehingga pemerintah mengubah kebijakan program RASKIN berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomer 63 tahun 2017 mengganti dengan Kebijakan program BPNT. Program BPNT mulai diperluas pada tahun 2019 di berbagai daerah.

Kebijakan Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan salah satu pengganti program Raskin, kesamannya antara RASKIN dan BPNT yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan pangan yang berupa beras. Perbedaan Raskin dan BPNT yaitu terletak pada sistem penyalurannya bahan pangan serta sistemnya juga berbeda (wawancara 1 februari 2021) . Dalam hal ini kebijakan program BPNT bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi pengeluaran beban keluarga. Adapun dua elemen Permasalahan yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas
2. Kelebihan dan Kekurangan BPNT

Tinjauan Pustaka

Kebijakan sebagai Program

Banyak sekali pendapat para ahli tentang definisi Kebijakan. seperti yang kita ketahui kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat, luas sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor-faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijakan yang dilakukan. Maka dari itu kebijakan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Implementasi Kebijakan

Dalam segi bahasa Implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan yang tersusun dari sebuah kebijakan. yang akan dilakukan. Selain itu adapun pendapat para ahli tentang Implementasi Kebijakan menurut Winarno Budi (2014: 46) berpendapat bahwa Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan. Implementasi arti secara luas makna pelaksanaan Undang-undang, dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selain itu adapun model-model implementasi kebijakan menurut para ahli. Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier sering disebut dengan model kerangka analisis Implementasi. Ada tiga kelompok yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yakni sebagai berikut :

1. Pertama, dapat dilihat dari karakteristik permasalahan, dibagi lagi menjadi 3 yaitu: Pertama, Tingkat kesulitan Masalah, artinya ada masalah yang relatif mudah untuk dipecahkan dan ada yang sulit untuk dipecahkan. Kedua, Tingkat Kemajemukan Sasaran, artinya masalah dapat dipecahkan apabila masalahnya homogen dan begitupun sebaliknya., Ketiga, Cakupan perilaku yang diharapkan, artinya sebuah program yang bertujuan yang bersifat kongnitif akan relatif mudah dan begitupun sebaliknya.
2. Kedua, dilihat dari Karakteristik Kebijakan, yang terdiri antara lain yaitu : a. Kejelasan Kebijakan yang berarti, semakin jelas dan rinci suatu kebijakan maka akan semakin mudah untuk di implementasikan, b. Seberapa jauh kebijakan tersebut, mempunyai dukungan teoritis, c. Besarnya alokasi sumber daya yang financial terhadap kebijakan tersebut, d. Seberapa besarnya ketepatan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Efektivitas Dalam Kebijakan

Seperti yang kita ketahui efektivitas merupakan salah satu tingkatan keberhasilan

dalam menjalankan suatu kebijakan atau keputusan yang telah disepakati bersama. Selain itu Adapun pendapat menurut para ahli tentang efektivitas salah satunya yaitu menurut (Makmur, 2015 :5) berpendapat bahwa untuk mengukur efektivitas seseorang atau kelompok dan organisasi maka harus melakukan perbandingan antara kebenaran dan ketepatan dengan kekeliruan yang dilakukan.

Dari definisi efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan salah satu pengukuran keberhasilan dari program yang dijalankan dengan menentukan sasaran yang tepat. Adapun indikator-indikator efektivitas menurut Sutrisno dalam (Lestari & Murti ,2015) berpendapat bahwa suatu program atau kegiatan dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator salah satunya yaitu :

1. Pertama, Pemahaman program, artinya dalam melaksanakan kegiatan harus memahami tujuan program sehingga suatu program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif.
2. Kedua, Tepat sasaran, maksudnya sasaran yang dituju harus jelas sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.
3. Ketiga, Tepat waktu artinya waktu pelaksanaan dalam menjalankan suatu program harus ditetapkan sehingga dapat mengurangi ketidaktepatan.
4. Keempat, Tercapainya tujuan, dapat dilihat dari ketepatan dalam menjalankan suatu program dan menentukan sasaran yang telah direncanakan.
5. Kelima, Perubahan nyata, dapat dilihat dari dampak program yang dijalankan dan dapat dirasakan oleh orang banyak.

Jadi dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas dari program BPNT perlu memiliki indikator efektivitas sebagai standar penilaian pencapaian tujuan. Menurut Dwijowijoto(2004: 179) ada beberapa tingkat efektivitas yaitu sebagai berikut :

- a. Efektif, artinya jika semua faktor yang mempengaruhi pelayanan terpenuhi dengan baik .
- b. Cukup efektif, artinya jika salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan ada yang tidak terpenuhi.
- c. Tidak efektif, artinya jika tidak ada satupun dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan.

Konsep Progam (BPNT)

BPNT merupakan salah satu bantuan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dan di setiap bulannya menerima bantuan melalui akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang yang telah bekerjasama dengan

bank yang disebut sebagai E-warung. Bantuan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang keadaan kondisi ekonominya dibawah 25 %.Elektronik Warung gotong atau E-warung adalah agen bank pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro kecil, dan koperasi, pasar tradisional.

Jadi,dapat disimpulkan bahwa BPNT merupakan salah satu bantuan pangan yang sistem penerimaannya melalui akun elektronik, selain itu bantuan ini diberikan pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang keadaan ekonominya dibawah rata-rata. Dengan adanya bantuan ini tentunya pemerintah mempunyai maksud dan tujuan tertentu dalam mengeluarkan kebijakan atau program yang telah direncanakan.

Adapun tujuan dari program BPNT yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya yaitu: Pertama, untuk mengurangi beban keluarga yang ekonominya dibawah rata-rata melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Kedua, untuk memenuhi gizi KPM agar lebih seimbang dan kebutuhan pangannya terjamin. Ketiga untuk lebih, meningkatkan ketepatan sasaran dan juga waktu serta jumlah, harga ,kualitas dan adiministarsi, dan yang Kelima, yaitu untuk memberikan pilihan serta kendali terhadap KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Operasional Program (BPNT)

Pelaksanaan program BPNT harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian , jumlah jenis, kualitas harga bahan pangan Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan atau telur) dan lokasi e-warung. Kedua, KPM tidak diarahkan pada e-warung tertentu dan e-warung tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.

Ketiga,E-warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi,Kempat,Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM , termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan, Kelima, Untuk Mendorong usaha kecil rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

Keenam,dapat Memberikan akses jasa keunagan kepada usaha kecil rakyat kepada KPM dan, Ketujuh, Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT

sesuai dengan pedoman umum petunjuk teknis yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyaluran BPNT akan berjalan dengan lancar apabila program yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sistematis, teratur dan terarah sehingga pelaksanaan BPNT dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan BPNT juga terkait dengan penerima manfaat BPNT yang merupakan keluarga dengan kriteria kondisi ekonominya paling rendah di daerah atau desa setempat maka dari itu hal ini disebut dengan keluarga Penerima Manfaat (KPM), Yang namanya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Unit Penerima BPNT adalah keluarga namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat BPNT perlu ditentukan 1 (satu) nama dalam KPM sebagai pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening BPNT.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2005:6) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang subjek yang dialami oleh peneliti misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain.

Pembahasan

BPNT sebagai Program

Seperti yang di ketahui BPNT sebagai program yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran beban keluarga masyarakat. Kebijakan ini merupakan salah satu keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yaitu salah satunya program BPNT.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program BPNT merupakan program yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan memodifikasi sistem yang lebih modern dan menghemat waktu. Selain itu program ini diutamakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terdaftar datanya di Kementerian Sosial yaitu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga KPM yang namanya sudah terdaftar maka akan otomatis akan mendapatkan bantuan tersebut.

KPM yang menerima bantuan tersebut telah sesuai dengan data yang ada di Kementerian Sosial yang ditentukan berdasarkan Desil 1 dan Desil 2. Maksud dari desil 1 yaitu masyarakat yang tergolong dalam angka miskin sedangkan desil 2 yaitu masyarakat yang tergolong dalam miskin nasional. Dalam penyaluran program BPNT ini telah ada Tim kordinasi masing-masing disetiap kecamatan dan di daerah masing-masing.

Implementasi Program BPNT

Implementasi merupakan cara atau proses dalam penerapan program yang akan dijalankan. Dalam hal ini program BPNT penerapannya dilakukan dalam 1 bulan sekali. Program bantuan BPNT ini diberikan kepada masyarakat yang dengan kondisi ekonominya kurang dari 25 % dan berpatokan pada Desil 1 yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi nya miskin dan desil 2 sangat miskin. Jadi dapat disimpulkan dalam proses penyaluran BPNT ini cukup mudah KPM hanya datang ke e warung yang telah ditentukan oleh desa dan membawa kartu program BPNT tersebut dan memasukkan dalam mesin memencet sandi yang telah ditentukan oleh KPM maka uang tersebut akan keluar setelah itu KPM dapat menurunkan uang tersebut dengan bahan pokok seperti beras untuk ketentuan beras yang diterima oleh KPM yaitu beras 10 Kg dengan kualitas beras yang bagus dan berbeda dengan beras pada saat program raskin. Dalam hal ini untuk efektivitas program BPNT yang di ambil 5 indikator yaitu, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

Efektivitas Program BPNT di Kota Sumenep

Dalam hal ini untuk efektivitas program BPNT yang di ambil 5 indikator yaitu, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata, dan untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

- a. Pemahaman program
Berdasarkan hasil Wawancara mengenai indikator efektivitas terkait dengan pemahaman program BPNT di Kota Sumenep sudah berjalan dengan baik, Selain itu masyarakat juga telah meamahami mekanisme penyaluran program BPNT dan masyarakat juga sangat antusias dengan bantuan BPNT ini karena kualitas beras yang diterima oleh KPM jauh lebih bagus dari program raskin, masyarakat senang atas bantuan ini karena tidak ada biaya tebus seperti program Raskin. Program BPNT ini sangat mudah dalam proses pencairannya masyarakat hanya membawa kartu dan menekan kode dari kartu BPNT tersebut maka saldo bantuan akan keluar dengan sendirinya. Selain itu setelah uang sudah keluar maka KPM dapat menurunkan uang tersebut dengan sejumlah beras yang telah ditentukan oleh e-warung.
- b. Tepat Sasaran
Tepat sasaran merupakan salah satu indikator-indikator efektivitas yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria- kriteria penerima BPNT. Tepat sasaran juga merupakan hasil dari yang diharapkan pemerintah terkait program BPNT ini. Jadi Dapat disimpulkan dari hasil wawancara

diatas mengenai ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program BPNT yang ada di kota Sumenep telah sesuai dengan kriteria indikator-indikator efektivitas Karena ketepatan sasaran dalam penerimaan program BPNT berdasarkan data yang telah ditentukan dari Kementerian Sosial. Sehingga KPM yang telah terdaftar di DTKS kementerian sosial maka akan dengan otomatis akan mendapatkan bantuan Program BPNT tersebut.

- c. Tepat Waktu
Seperti yang di ketahui waktu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menjalankan suatu program. Jadi dari hasil wawancara peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran program BPNT di Kota Sumenep Tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan kondisi yang dihadapi saat ini yaitu karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga proses penyaluran BPNT mengalami keterlambatan. Yang biasanya KPM menerima 1 bulan sekali pada saat pandemi ini KPM hanya menerima 3 bulan sekali. Tentunya hal ini bukan kesalahan dari pihak Dinas Sosial karena yang menentukan penyaluran Program BPNT ini ditentukan oleh Kementerian Sosial.
- d. Tercapainya Tujuan
Tercapainya tujuan merupakan salah satu indikator efektivitas dan juga merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan program agar tujuan yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program BPNT ini sangat bermanfaat bagi masyarakat salah satunya yaitu dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan masyarakat khususnya dalam kebutuhan pangan masyarakat. Masyarakat yang menerima Program BPNT di Kota Sumenep ini sangat antusias karena dapat meringkankan beban pengeluaran keluarga.

Kelebihan dan Kekurangan dari Program BPNT

- a. Kelebihan Program BPNT
Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan suatu program yang dijalankan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun hasil wawancara peneliti dan dapat disimpulkan bahwa proses kelebihan dari program BPNT ini yaitu salah satunya dapat menghemat waktu, prosesnya yang juga cepat membuat masyarakat sangat antusias dalam menanggapi program BPNT ini.
- b. Kekurangan Program BPNT
Seperti yang kita ketahui setiap dalam menjalankan suatu program akan ada suatu

kelemahan serta kelebihan dari program tersebut. Selain itu kelemahan ini dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah atau aparaturnegara dalam menangani program yang telah ditentukan serta sebagai acuan untuk mengetahui kelemahan dari program BPNT.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti menarik dua kesimpulan dari efektivitas program BPNT yang ada di kota Sumenep. Pertama, Dilihat dari indikator-indikator efektivitas yaitu (pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata), Program BPNT yang ada di kota Sumenep Cukup efektif. Karena pada saat pandemi covid-19 ini penyaluran program BPNT di kota Sumenep sedikit terhambat tidak tepat waktu. Hal ini yang membuat program BPNT di kota Sumenep Cukup efektif.

Kedua, Seperti yang di ketahui dalam setiap membuat kebijakan maka tidak pernah luput dari Kelebihan dan kekurangan dari program yang dijalankan oleh pemerintah salah satunya program BPNT ini tentunya juga memiliki kelemahan yaitu pembaruan data yang cukup lama, serta penonaktifkan pemilik KPM yang telah meninggal juga cukup lama. Selain kelemahan adapun kelebihan dari program BPNT ini salah satunya dapat menghemat waktu, dan merupakan bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan oleh penulis mengenai efektivitas program BPNT di Kota Sumenep penulis memberikan saran kepada Dinas Sosial yaitu salah satunya mempercepat proses pembaruan data sehingga dapat digantikan dengan masyarakat miskin yang butuh bantuan. Dan untuk penelitian selanjutnya dan akademisi lainnya yaitu bisa melakukan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Hayat (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Refrormasi, Formulasi)*. Malang Intrans Publishing
- Winarno, Budi 2014 *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta Center Of Academic Publisihing Service
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2004 *Kebijakan Publik Formulasi ,Implementaasi dan evaluasi*. Jakarta : PT Eles Komputindo Kelompok Gramedia
- Harbani (2017), *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta

- Puan Maharani (2019), *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
- Hardani, Adriani Helmina dkk, 2020. “ *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Moelong, Lexy, 2014. “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Makmur 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama
- Steers R.M (1998) *Efektivitas Organisasi*.
- Ayu Ningsih Panca Wati (2019). *Difusi Inovasi dalam Kegiatan Komunikasi Pembangunan dalam kegiatan komunikasi pembangunan (studi deskriptif terhadap program BPNT) di kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Resdiana Enza (2020). *Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Bansos dan BPNT di Kecamatan Gapura*. Universitas Wiraraja Sumenep Vol : 3 Nomer 1 hlm 1-5
- Permata Putri Indah (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung*. Universitas Komputer Indonesia
- Ahda Salukin Nisa (2019). *Analisis bantuan Pangan Non Tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Lestari, R.P. dan Murti, (2015). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm) Studi Kasus di desa Sedengan Mijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*, 195.201
- Renky Amalia Permata Sari (2021). *Monitoring Dan Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Undang-undang 9 tahun 2016
- Undang-Undang 63 tahun 2017
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sumenep [https://data primer sumenep.kab.go.id/](https://data.primer.sumenep.kab.go.id/)